

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengetahuan sejarah dan perkembangan akuntansi berguna dalam memahami apa yang terjadi di masa lalu dan bagaimana proses perkembangannya sehingga perkembangan itu sampai seperti saat ini (Harahap, 2011). Sejarah perkembangan sistem akuntansi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana praktik akuntansi merupakan tanggapan atas perusahaan lingkungan dan kebutuhan sosial di era globalisasi sekarang ini terutama di instansi pemerintahan. Instansi pemerintahan memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola keuangan negara maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Setiap dana yang dikelola bersumber dari pajak rakyat dan berbagai pendapatan negara lainnya, sehingga pengelolaanya harus dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance). Dalam hal ini, praktik akuntansi memiliki peran penting sebagai alat untuk mencatat, mengklasifikasi, mengikhtisarkan, dan melaporkan seluruh transaksi keuangan secara sistematis. Dengan penerapan akuntansi yang baik, instansi pemerintahan dapat meminimalisir potensi penyimpangan, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, serta menciptakan kepercayaan publik kepada pemerintah.

Sejalan dengan reformasi di segala sektor pemerintahan termasuk yang di tandai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 , maka tuntutan sampai besar kepada sektor publik termasuk pemerintah daerah untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabilitas setiap rupiah dana yang diterima dari masyarakat. Penerapan Sistem Akuntansi yang baik tentunya secara konsep dapat berperan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas serta memenuhi kriteria kualitas relevan, andal, dapat dipercaya dan dibandingkan.

Sesuai dengan amanat **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005** tentang pengelolaan keuangan daerah yang telah dijabarkan dalam Keputusan **Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002**, yang direvisi menjadi keputusan **Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006** tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Tata Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, yang secara substantif memberikan pedoman bagi pelaksanaan sistem pengelola keuangan yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output) dari perencanaan alokasi biaya (input) yang disediakan.

Otonomi Daerah membuat Pemerintah Daerah mampu untuk dapat mengelola sumber-sumber yang ada di daerahnya yang akhirnya mampu memperoleh Pendapatan Asli daerah semaksimal mungkin akan secara langsung menambah Pendapatan Daerah. Apabila pendapatan daerah dapat meningkat maka akan dapat membiayai Belanja Daerah sehingga sistem pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah dapat mencapai tingkat yang efektif sesuai yang direncanakan. Pencapaian tujuan dan sasaran akhir merupakan ukuran efektif tidaknya kinerja non finansial Kinerja Pengelolaan Pemerintah Daerah.

Jika Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah belum diterapkan maka akan berakibat, yaitu :

1. Terjadi ketidaksesuaian dalam penyusunan laporan keuangan daerah dengan standar akuntansi yang ada, dan membuat bingung para pengguna laporan keuangan tersebut.
2. Kemungkinan besar pengeluaran lebih besar dari penerimaan, tidak adanya kontrol dalam penggunaan anggaran.
3. Terjadi manipulasi laporan keuangan
4. Banyak terjadi penyimpangan dalam menggunakan uang.

Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pemerintah provinsi Sumatera Barat telah mengatur sistem akuntansi keuangan daerah melalui beberapa peraturan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Berikut adalah peraturan-peraturan yang terkait :

1. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan ini mengatur tentang kebijakan Akuntansi, Sitem Akuntansi, dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi.

2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2022

Peraturan ini mengatur pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh, mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah.

3. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2019

Peraturan ini mengatur tata cara penyelenggaraan sistem informasi Keuangan Daerah (SIKD), termasuk perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem tersebut.

Meskipun regulasi telah mendukung penerapan praktik akuntansi yang baik, dalam implementasinya masih dijumpai berbagai tantangan di lapangan. Berbagai instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah, masih menghadapi kendala teknis maupun non-teknis yang menghambat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Beberapa permasalahan yang umum terjadi antara lain adalah kurangnya kompetensi sumber daya manusia dalam

bidang akuntansi, minimnya pemahaman terhadap SAP berbasis akrual, sistem informasi keuangan yang belum optimal, serta lemahnya pengawasan internal.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas pengelolaan anggaran negara yang berdampak pada kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Padahal keberhasilan pembangunan dan pengelolaan sumber daya nasional sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola keuangan pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan praktik akuntansi di instansi pemerintahan merupakan langkah strategis yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut integritas dan kredibilitas pemerintah dalam mengelola dana publik.

Berdasarkan penjelasan diatas, Penulis merasa penting untuk mengangkat isu ini dalam tugas akhir dengan tujuan mengkaji pentingnya praktik akuntansi di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, serta memberikan referensi yang relevan untuk peningkatan akuntansi yang berkualitas di instansi tersebut. Selain itu, Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem akuntansi sektor publik, khususnya dibidang kehutanan, guna menunjang tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membuat judul Tugas Akhir dengan judul **“ANALISIS SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat?
2. Apa saja kendala yang terjadi di Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Barat? beserta Solusinya.

1.3 Tujuan Penulisan

1. Menganalisis efektivitas sistem akuntansi keuangan yang diterapkan di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
2. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan.

1.4 Manfaat Penulisan

Dengan adanya penulisan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan pengaplikasian pengetahuan tentang penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
- b. Penulis dapat mempersiapkan diri secara mental maupun fisik juga kualitas dalam rangka menghadapi persaingan dunia kerja semakin kompetitif
- c. Menambah dan meningkatkan keterampilan serta keahlian dibidang praktek
- d. Sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.

1.5 Manfaat Magang

Pelaksanaan magang di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang menjadi dasar penyusunan tugas akhir dengan judul “Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

1. Bagi Mahasiswa

- a. Memberikan pengalaman nyata dalam mengamati dan menganalisis sistem akuntansi keuangan yang diterapkan di Instansi Pemerintah Daerah
- b. Meningkatkan pemahaman tentang alur pencatatan, pelaporan, pengendalian keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP)
- c. Melatih kemampuan analisis terhadap efektifitas sistem akuntansi keuangan daerah, serta menemukan kendala atau kelemahan yang mungkin terjadi dipenerapannya.
- d. Menjadi referensi utama dalam penyusunan tugas akhir yang berbasis praktik lapangan.

2. Bagi Perguruan Tinggi

- a. Memberikan gambaran tentang relevansi kurikulum akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik, dengan praktik nyata disektor pemerintah
- b. Menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*)
- c. Memperluas jejaring kerja sama antar kampus dengan instansi pemerintahan daerah seperti Dinas Kehutanan.

3. Bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

- a. Mendapatkan referensi tambahan berupa hasil analisis dari mahasiswa terhadap sistem akuntansi keuangan yang sedang berjalan.
- b. Mendukung proses pengembangan dan perbaikan sistem pencatatan serta pelaporan keuangan agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- c. Berkontribusi dalam pengembangan kompetensi calon akuntan yang memahami dinamika pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

1.6 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan Magang

Penulis melaksanakan kegiatan magang selama 40 hari kerja. Kegiatan magang ini dilaksanakan di Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No.8A, Ulak Karang Sel., Kec Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Lokasi tersebut dipilih karena perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan yang memiliki reputasi yang baik, selain itu mampu mendukung penulis untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan oleh penulis.

1.7 Metode Pengumpulan Data

Untuk memiliki data yang relevan dan dapat diuji kebenarannya, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Metode pertama yang dilakukan oleh penulis yaitu wawancara melalui tatap muka dan tanya jawab antara penulis dan narasumber. Wawancara yang dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Penulis juga akan melakukan pengamatan yang terjadi di lapangan dan juga akan ada pengambilan data dari narasumber.

2. Studi Pustaka

Untuk mendukung proposal ini penulis juga menambahkan informasi dan referensi dari berbagai sumber buku, jurnal, dan informasi lain yang terkait dengan teori untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh penulis.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan untuk Tugas Akhir terdiri dari V BAB yaitu, sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada BAB 1 Pendahuluan terdiri atas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat penulisan, Manfaat Magang, Waktu Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB 2: LANDASAN TEORI

Pada BAB 2 Landasan Teori menguraikan secara teoritis berisi tinjauan pustaka mengenai Analisis Akuntansi, Sistem Akuntansi, Keuangan, Pemerintah Daerah, dan Bagan Alir

BAB 3: GAMBARAN UMUM

Pada BAB 3 Gambaran Umum berisi tentang mengenai gambaran umum perusahaan yang terdiri dari Profil perusahaan, visi dan misi perusahaan, budaya kerja, dan struktur organisasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

BAB 4: PEMBAHASAN



Pada BAB 4 Pembahasan berisi mengenai tentang penyajian hasil atau data yang didapat pada saat magang Bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah pada dinas kehutanan provinsi sumatera barat dan apa saja kendala yang terjadi di dinas kehutanan provinsi sumatera barat beserta solusinya.

BAB 5: PENUTUP

Pada BAB 5 Penutup ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah dibahas oleh penulis dan juga saran yang diharapkan dapat membangun dan bermanfaat bagi perusahaan untuk kelangsungan aktivitas perusahaan dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

